

# MENGHADIRKAN PEREMPUAN DALAM HISTORIOGRAFI PASCA MERDEKA: MEMBANGUN KARAKTER BELA NEGARA MELALUI NARASI SEJARAH

## PRESENTING WOMEN IN POST-INDEPENDENCE HISTORIOGRAPHY: BUILDING THE CHARACTER OF DEFENDING THE COUNTRY THROUGH THE HISTORY

Ayu Wulandari<sup>1</sup>

Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada  
(ayuwulandari99@mail.ugm.ac.id)

**Abstrak** – Makalah ini membahas pentingnya narasi sejarah dalam upaya menumbuhkan karakter bela negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan pola pikir mengenai bela negara, yaitu bahwa bela negara hanya dilakukan TNI dan POLRI, serta bela negara hanya pantas dilakukan oleh laki-laki. Dalam permasalahan tersebut, studi sejarah berperan penting untuk mendekonstruksi pola pikir masyarakat. Karenanya, makalah ini menawarkan solusi untuk membangun karakter bela negara, yaitu melalui upaya menghadirkan perempuan dalam historiografi pasca kemerdekaan. Makalah ini bertujuan untuk mendorong pembongkaran terhadap pengeksklusian peran perempuan dalam historiografi pasca kemerdekaan, sebab pada kenyataannya, banyak perempuan Indonesia yang terlibat dalam upaya bela negara pasca 1945. Hasil penelitian dalam makalah ini menunjukkan bahwa pasca kemerdekaan Indonesia, banyak perempuan yang memiliki peranan penting dalam bidang politik, kesenian, hingga bidang kesehatan. Dengan memperkenalkan narasi tentang betapa pentingnya peran perempuan sepanjang sejarah pasca kemerdekaan, maka generasi muda akan memiliki kesadaran bahwa bela negara juga dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Dengan demikian, menghadirkan perempuan dalam historiografi pasca merdeka akan sangat membantu bangsa Indonesia untuk menumbuhkan karakter bela negara.

**Kata Kunci:** bela negara, historiografi, kesadaran sejarah, pengeksklusian, perempuan

**Abstract** – This paper discusses the importance of historical narrative in an effort to grow the character of the defense of the country. This is motivated by the problem of mindset about defending the country, that defending the country is the duty of the Indonesian National Army and Police, and defending the country is only appropriate for men. In this issue, historical studies play an important role in deconstructing people's mindsets. Therefore, this paper offers a solution to build the character of defending the country, namely through efforts to present women in post-independence historiography. This paper aims to encourage the dismantling of the exclusion of women's roles in post-independence historiography, because in reality, Indonesian women are involved in the defense of the state after 1945. The results of the research in this paper show that after Indonesia's independence, many women had a role important in politics, the arts, to the health sector. By introducing a narrative about how important the role of women in the history of post-independence, the younger generation will have an awareness that defending the country can also be done by women. Thus, presenting women in post-independence historiography will greatly help the Indonesian people to grow the character of the country's defense.

**Keywords:** exclusion, historical awareness, historiography, state defense, women

---

<sup>1</sup> Program Studi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

## Pendahuluan

Dewasa ini, kehidupan masyarakat secara global bergerak dengan sangat dinamis. Ancaman baik yang bersifat militer, ekonomi, politik, bahkan biologi, dapat sewaktu-waktu menyerang Indonesia. Akhir-akhir ini, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, dikejutkan dengan munculnya Covid-19 yang menyebar secara massif hampir di seluruh dunia. Fasilitas kesehatan yang terbatas hingga tidak adanya persiapan yang matang dalam menghadapi pandemik Covid-19 menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi, jumlah pasien terkonfirmasi positif mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dalam keadaan seperti ini, tentu Indonesia membutuhkan kepedulian warga negaranya. Bela negara, bagaimanapun, menjadi sesuatu yang wajib dilakukan selama masa pandemi ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan pemerintah, bahwa setiap warga negara wajib berperan untuk menyelamatkan negara dari penyebaran Covid-19, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.<sup>2</sup>

Kemudian, dinamika di bidang lainnya yang terjadi akhir-akhir ini juga menuntut masyarakat untuk memiliki karakter bela negara. Misalnya, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina akhir-akhir ini tentu menuntut masyarakat Indonesia untuk

<sup>2</sup> Kristomei Sianturi, “Bersatu, Bela Negara Lawan Covid-19”, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/305145-bersatu-bela-negara-lawan-covid-19>, 18 April 2020, diakses pada 6 Juni 2020.

menyelamatkan ekonomi negaranya. Bahkan, dari dalam negeri pun, dapat muncul ancaman yang membahayakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena kemunculan kerajaan fiktif pada awal tahun 2020 lalu misalnya, turut menguji komitmen masyarakat mengenai bela negara. Pasalnya, jika fenomena tersebut dibiarkan, maka dapat terjadi penipuan yang mengatasnamakan kebudayaan, ancaman bagi legalitas NKRI, serta ancaman lainnya.

Meskipun berbagai fenomena dan peristiwa menguji komitmen bela negara masyarakat Indonesia, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa di kalangan masyarakat sendiri masih terdapat kesalahpahaman mengenai konsep bela negara. Secara umum, terdapat dua masalah besar mengenai kesalahpahaman konsep bela negara. Bela negara sejauh ini hanya dipahami sebagai upaya pembelaan negara melalui bidang militer oleh TNI ataupun melalui bidang keamanan oleh Polri. Pemahaman seperti ini wajar terjadi pada kalangan masyarakat umum, mengingat Pemerintah menetapkan Hari Bela Negara tepat pada 19 Desember, berdasarkan peristiwa 19 Desember 1948.<sup>3</sup> Pada kenyataannya, 19 Desember 1948 adalah hari dimana Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibukota Republik Indonesia. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara tersebut, tentu mendorong

<sup>3</sup> Susanto Zuhdi, “Bela Negara Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia”, *Wira*, 2017, hlm. 15.

masyarakat untuk berpikir bahwa bela negara selalu berkaitan dengan kekuatan pertahanan dan keamanan.

Selain itu, muncul pula *stereotype* bahwa bela negara hanya layak dan harus dilakukan oleh laki-laki. Padahal, pada dasarnya bela negara merupakan upaya untuk mempertahankan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Tentu, upaya tersebut dapat dilakukan oleh semua kalangan, termasuk perempuan.

Sayangnya, karakter bela negara pada bangsa Indonesia justru menurun seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Padahal, kekuatan bangsa, termasuk didalamnya adalah karakter bela negara turut menjadi bagian dari kekuatan nonmiliter sebuah negara.<sup>4</sup> Kekuatan nonmiliter ini termasuk mencakup rakyat, baik laki-laki maupun perempuan. Penurunan karakter bela negara ini, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya kurikulum pendidikan yang memuat materi bela negara serta belum optimalnya aktualisasi upaya untuk melakukan bela negara.<sup>5</sup>

Selain itu, penurunan karakter bela negara tidak lain juga disebabkan oleh terjadinya diskriminasi gender. Diskriminasi gender yang dimaksud

<sup>4</sup> Suryanto Suryokusuma, ed., *Bunga Rampai Konsep Sistem Pertahanan Non Militer: Suatu Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm. 113.

<sup>5</sup> I Nengah Suriata, "Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 49-50.

adalah adanya *stereotype* bahwa kegiatan bela negara hanya cocok dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu, kaum perempuan dinilai tidak dapat berbuat banyak untuk kepentingan bangsa dan negara. Padahal, konstitusi negara Indonesia telah mewadahi kesetaraan gender dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi, kesetaraan gender sejauh ini hanya dilihat dan ditempatkan dalam akses untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesempatan ekonomi, kesehatan, tetapi sangat terbatas dalam konsep bela negara. Padahal, dalam perspektif ketahanan nasional, kaum perempuan justru memiliki peran yang sangat penting.

Mengamati adanya ketimpangan gender dalam bela negara, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketimpangan ini dapat terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini tentu dapat dikaji dari berbagai sisi. Akan tetapi, terdapat satu hal mendasar yang sangat penting dalam persoalan ini yaitu mengenai historiografi atau penulisan sejarah Indonesia. Historiografi Indonesia sejauh ini dapat dikatakan didominasi oleh peran laki-laki, termasuk dalam narasi masa-masa sekitar kemerdekaan Indonesia yang menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan karakter bela negara. Dalam upaya mempertahankan kedaulatan selama 1945-1950an misalnya, narasi mengenai keterlibatan perempuan jarang sekali dihadirkan. Dalam upaya diplomasi misalnya, merujuk pada *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa* yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia, narasi yang

dihadirkan hanya memuat perjuangan tokoh laki-laki seperti Ali Sastroamidjojo, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya yang berperan dalam perjuangan diplomasi Indonesia.<sup>6</sup> Sementara, peran perempuan hanya dihadirkan dalam narasi sejarah sosial, sehingga perempuan hanya dianggap sebagai aktor figuran dalam upaya bela negara. Akibatnya, tertanam gagasan bahwa upaya bela negara hanya dapat dan wajib dilakukan oleh kaum laki-laki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka makalah ini membahas pentingnya menghadirkan perempuan dalam historiografi Indonesia pasca kemerdekaan, sehingga masyarakat memahami bahwa karakter bela negara tidak hanya wajib ditumbuhkan pada kaum laki-laki. Karenanya, makalah ini akan menguraikan peran kaum perempuan dalam bela negara dari masa ke masa.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat sejauh ini belum terdapat kajian mengenai urgensi kehadiran perempuan dalam historiografi sebagai solusi dalam penanaman karakter bela negara. Mayoritas kajian yang dihasilkan oleh para akademisi adalah kajian yang menjelaskan tentang bela negara dari berbagai sisi, termasuk mengenai nasionalisme. Sementara itu, kajian mengenai sejarah perempuan ditempatkan secara terpisah dari konsep bela negara.

Adapun beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini misalnya

<sup>6</sup> Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa*, 4 jilid, (Jakarta: Deplu RI, 1996).

kajian dari Rachel Rinaldo yang berjudul *Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia*<sup>7</sup>. Kajian dari Rachel Rinaldo tersebut membahas feminisasi ruang publik di Indonesia, sehingga para perempuan dapat bekerja dan menumbuhkan nasionalisme mereka melalui banyak bidang, terutama bagi perempuan muslim. Kemudian, dalam *Indonesia and Globalization*<sup>8</sup>, Ann Murphy telah menganalisis dinamika nasionalisme Indonesia di tengah arus globalisasi. Kajian tersebut tentu sangat berguna untuk memetakan upaya bela negara yang dilakukan bangsa Indonesia, termasuk kaum perempuan, dari waktu ke waktu. Selanjutnya, konsep bela negara yang memiliki keterkaitan sangat dekat dengan nasionalisme, dapat dipahami melalui kajian dari Kramer, bahwa upaya mewujudkan nasionalisme antara satu negara dengan negara lain dapat berbeda.<sup>9</sup> Kramer memberikan contoh mengenai negara Prancis, yang menekankan nasionalisme pada rasionalitas dan kebebasan. Dengan demikian, Indonesia tentu memiliki bentuk nasionalisme dan upaya bela negaranya sendiri, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa setiap warga negara berhak dalam upaya bela negara. Artinya, Indonesia mengakui kesetaraan gender dan keterlibatan warga negara

<sup>7</sup> Rachel Rinaldo, "Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia", *Social Forces*, Vol. 86, No. 4, 2008, hlm. 1781-1804.

<sup>8</sup> Ann Murphy, "Indonesia and Globalization", *Asian Perspective*, Vol. 23, No.4, 1999, hlm. 229-259.

<sup>9</sup> Llyod Kramer, "Historical Narratives and the Meaning of Nationalism", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 58, No. 3, 1997, hlm. 525-545.

dari berbagai kalangan dalam upaya bela negara. Mengenai kajian lainnya yang telah ada, memiliki pembahasan yang tidak jauh berbeda dengan kedua kajian tersebut, yaitu membahas nasionalisme dan membahas peran perempuan dalam sejarah secara tersendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya menghadirkan perempuan dalam narasi sejarah bela negara. Kemudian, penelitian ini juga untuk menganalisis sumbangan kaum perempuan sepanjang sejarah Indonesia, sehingga masyarakat memahami pentingnya posisi kaum perempuan dalam pertahanan negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong para pengambil kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional untuk menggugah semangat kaum perempuan agar ikut serta dalam upaya bela negara melalui berbagai program kegiatan. Hal ini mengacu pada konsep bela negara yang ditegaskan dalam penelitian ini, bahwa bela negara dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak terbatas pada bidang militer, melainkan dapat mencakup bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan politik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu penelitian yang mengkaji, menganalisis, dan mengkritisi rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>10</sup> Penelitian ini diawali dengan

<sup>10</sup> Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah*,

pengumpulan sumber (heuristik), baik sumber primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini adalah surat kabar, majalah, artikel, serta buku yang relevan dengan kajian penelitian. Untuk memperoleh sumber, maka penelitian dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan dan situs resmi yang dapat diakses secara daring. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan melakukan proses verifikasi. Verifikasi tersebut dilakukan dengan membandingkan isi satu sumber dan sumber lainnya, sehingga diperoleh sumber yang kredibel dan dapat dipercaya.

Setelah melakukan verifikasi, maka sumber-sumber tersebut melalui tahap interpretasi. Dalam tahap ini, setiap sumber akan ditafsirkan sehingga diperoleh fakta dari sumber-sumber tersebut. Setelah memperoleh fakta, maka tahap terakhir dari penelitian ini adalah penulisan fakta-fakta tersebut menjadi sebuah tulisan yang kronologis dan dapat dipercaya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Upaya bela negara telah dilakukan sejak awal Indonesia merdeka. Pada masa revolusi, upaya bela negara menjadi prioritas Pemerintah Indonesia yang saat itu tengah mempertahankan kedaulatan negara. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara, baik militer, diplomasi, maupun melalui kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Akan tetapi, penulisan sejarah Indonesia terutama

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), hlm. 17.

mengenai bela negara sejauh ini hanya terfokus pada upaya-upaya melalui bidang militer. Di sisi lain, narasi sejarah Indonesia juga sebagian besar hanya fokus pada upaya bela negara yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Akibatnya, terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan karakter bela negara. Pemahaman dan penumbuhan karakter bela negara oleh sebagian besar masyarakat dianggap hanya merupakan kewajiban laki-laki, sementara perempuan hanya bertanggung jawab atas urusan domestik seperti urusan rumah tangga. Padahal, perempuan juga memiliki peran penting dalam upaya bela negara. Selain itu, karakter bela negara juga tidak hanya terpaku pada bidang militer, sebab melalui bidang politik, ekonomi, sosial, diplomasi, dan kebudayaan, para perempuan juga bisa memupuk karakter bela negara.

### **Perempuan dan Perannya Pasca Kemerdekaan Indonesia**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perempuan mengalami pengesklusian dalam historiografi Indonesia, terutama yang menekankan pada narasi bela negara. Hal ini dikarenakan penulisan perempuan dalam historiografi masih dibayangkan oleh perspektif kolonial, dimana perempuan penting untuk ditulis ketika mereka terlibat dalam gerakan melawan kolonialisme. Sementara dalam narasi sejarah sejak masa kemerdekaan hingga reformasi, peran perempuan mengalami domestikasi. Akibatnya, peran perempuan dalam upaya bela negara masih tereksklusi.

Peran perempuan dalam berbagai gerakan, kongres, atau melalui kelompok-kelompok lainnya, semata-mata dianggap hanya sebagai aktivitas sosial biasa dan tidak memiliki signifikansi dalam upaya bela negara. Padahal, penulisan mengenai peran perempuan secara utuh dalam historiografi dapat mengungkap konsep bela negara yang dapat dan wajib dilakukan semua kalangan, termasuk kaum perempuan.

Sejak masa revolusi kemerdekaan, upaya bela negara melalui militer memang dilakukan oleh para tentara dan laskar-laskar perjuangan. Akan tetapi, bukan berarti para perempuan tidak memiliki andil dalam upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Para perempuan bahkan memiliki peran yang sangat penting dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, terutama dalam urusan dapur umum dan pengobatan bagi pejuang-pejuang yang terluka. Perempuan Indonesia pada masa revolusi yang tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia, juga banyak berkorban selama periode tersebut. Mereka misalnya harus mengikuti hijrahnya Divisi Siliwangi ke Yogyakarta pasca perundingan Renville, dan terpaksa meninggalkan rumahnya di wilayah yang diduduki oleh Belanda.<sup>11</sup> Banyak dari para perempuan itu yang kemudian memilih bertugas di dapur umum, palang merah, atau menjalankan tugas lainnya seperti menjadi kurir, sehingga perjuangan militer dapat

---

<sup>11</sup> Anton Lucas, "Pengalaman Wanita Selama Zaman Pendudukan dan revolusi, 1942-1950", *Prisma*, Vol. XXV, No. 5, 1996, hlm. 27.

dilakukan dengan lebih baik. Hal itu semata-mata dilakukan karena adanya kesadaran membela eksistensi Republik Indonesia. Akan tetapi, perjuangan para perempuan tersebut seringkali absen dalam narasi sejarah nasional Indonesia. Narasi sejarah sejauh ini cenderung melakukan glorifikasi terhadap peran laki-laki, sehingga peran perempuan dalam sejarah bangsa cenderung terpinggirkan.

Dalam sejarah politik, mayoritas narasi yang dibangun juga adalah mengenai peran kaum laki-laki. Hal ini terjadi baik dalam penulisan sejarah politik dalam negeri, maupun mengenai politik luar negeri Indonesia. Padahal, sejak masa pemerintahan Soekarno, perempuan telah diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Bahkan, perempuan telah mendapatkan hak untuk terlibat dalam pemilihan umum, serta hak untuk mewakili rakyat di parlemen.<sup>12</sup> Merujuk pada konsep bela negara, maka perempuan pada masa pemerintahan Soekarno dapat dikatakan telah memiliki karakter dan kesadaran bela negara. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang membela kepentingan bangsa melalui bidang politik.

Pada bidang politik dalam negeri, terdapat tokoh perempuan yang cukup mendominasi dalam upaya bela negara. Tokoh tersebut ialah Maria Ulfah, perempuan kelahiran Banten, 18 Agustus

1911.<sup>13</sup> Perempuan yang pernah dicalonkan menjadi salah satu anggota Volksraad ini diangkat menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II tahun 1946, sekaligus menjadi menteri perempuan pertama dalam sejarah Indonesia.<sup>14</sup> Melalui jabatannya sebagai Menteri Sosial, Maria Ulfah turut serta dalam upaya bela negara, terutama dengan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan Indonesia dan kemajuan bagi kaum perempuan. Misalnya, pada 1948, ketika di Paris diselenggarakan sebuah pertunjukan besar, Maria Ulfah mengajak para perempuan Indonesia untuk membuat karya mereka dan mengirimkannya ke Paris.<sup>15</sup> Tentu saja, apa yang dilakukan Maria Ulfah tersebut adalah upaya bela negara untuk menunjukkan kemampuan kaum perempuan Indonesia pada dunia internasional, khususnya pada saat itu dimana Indonesia masih berkonflik dengan Belanda.

Kemudian, pada politik luar negeri, juga terdapat kaum perempuan yang dikatakan ikut serta dalam upaya bela negara. Terdapat Supeni Pudjobuntoro, perempuan kelahiran Tuban, Agustus 1917. Nama Supeni barangkali belum banyak tercatat dalam historiografi

<sup>12</sup> Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 3, 2004, hlm. 287, dalam [www.jurnal.ugm.ac.id](http://www.jurnal.ugm.ac.id), diakses pada 6 Juni 2020.

<sup>13</sup> Gadis Rasid, *Maria Ulfah Subadio: Pembela Kaumnya*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1982), hlm. 7.

<sup>14</sup> Itama Citra Dewi Kurnia Wahyu, "Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988", *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

<sup>15</sup> Yunita Maria Ndoi, "Pemberitaan Perempuan Dalam Koran Kedaulatan Rakyat Tahun 1945-1950", *Skripsi*, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018, hlm. 56.

Indonesia. Akan tetapi, masyarakat perlu mengenal sosok Supeni agar mereka, kaum perempuan terutama, terdorong untuk memiliki karakter bela negara. Supeni Pudjobuntoro pada awalnya merupakan aktivis gerakan perempuan, sama seperti Maria Ulfah dan tokoh-tokoh perempuan lainnya. Pasca kemerdekaan Indonesia, Supeni aktif dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagai salah seorang anggota PNI, Supeni memiliki kedekatan dengan Soekarno. Karenanya, tidak jarang Supeni diutus oleh Soekarno untuk membantu terselenggaranya pemerintahan Indonesia.

Pada 1950an, Supeni memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pada saat itu, Supeni diutus oleh Presiden Soekarno untuk mempelajari pemilihan umum di India, sehingga Indonesia memiliki model untuk penyelenggaraan pemilihan umum pada 1955. Atas jasa Supeni yang melawat dan melakukan diplomasi ke India tersebut, Indonesia berhasil melakukan pemilihan umum 1955 meski pada saat itu pengetahuan politik pada masyarakat masih cukup rendah. Kemudian, Supeni juga salah satu perempuan yang terlibat dalam misi pengembalian Irian Barat, sebuah misi diplomasi yang gencar dilakukan Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar dilaksanakan. Kegigihan Supeni dalam bela negara patut dicontoh oleh kaum perempuan Indonesia. Pasalnya, demi mensukseskan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, Supeni berkeliling untuk menemui pemimpin

negara-negara Asia dan Afrika.<sup>16</sup> Bahkan, atas jasanya, Supeni mendapat julukan *the Irian Lady*.

Keberhasilan Supeni dalam peranannya pada politik luar negeri, sebenarnya memberikan kesan tersendiri bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pasalnya, pada 1950an, banyak negara yang masih melarang perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam upaya diplomasi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan tidak mampu membela kepentingan negaranya di jalur diplomasi. Selain itu, para perempuan juga dianggap sebagai penghancur maskulinitas laki-laki yang telah lama menguasai dunia diplomasi, sebagaimana dikatakan Cindy Minoriva-banjac dengan mengutip gagasan dari Machiavelli.<sup>17</sup> Karenanya, para perempuan yang mendapatkan kesempatan membela kepentingan negaranya melalui upaya diplomasi, menjadi tonggak perubahan yang cukup penting dalam perpolitikan abad ke-20.

Selain pada bidang politik, kaum perempuan juga memiliki peranan yang sangat penting pada bidang lainnya selama masa pemerintahan Soekarno. Misalnya, dalam bidang kebudayaan, kaum perempuan banyak terlibat dalam acara kebudayaan internasional. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan

<sup>16</sup> Indira Ardanareswari, "Supeni: "Irian Lady" di Balik Operasi Pengambilalihan Papua", dalam <https://tirto.id/supeni-irian-lady-di-balik-operasi-pengambilalihan-papua-ehsC>, 4 September 2019, diakses pada 8 Juni 2020.

<sup>17</sup> Cindy Minarova-Banjac, "Gender Culture in Diplomacy: A Feminist Perspective", *Culture Mandala*, Vol. 13, No. 1, 2018, hlm. 20-44.



Soekarno, ada ambisi dalam hal diplomasi kebudayaan. Misalnya, terdapat tokoh bernama Sutanti, perempuan yang pernah mempelajari tari klasik dan kontemporer di Perkumpulan Kesenian Irama Tjitra.<sup>18</sup> Pada 1954, Sutanti bersama para penari lainnya diutus oleh Pemerintah untuk menyajikan tarian Indonesia dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Beijing, Cina. Tidak hanya itu, sebab Sutanti dan para penari lainnya juga berkeliling di kota-kota besar di Cina untuk mengadakan pertunjukan tarian Indonesia.<sup>19</sup> Bahkan setiap acaranya selalu disambut dengan antusiasme masyarakat di sana. Pada dasarnya, peran Sutanti tersebut sangat strategis untuk membentuk karakter bela negara para generasi muda. Namun sayangnya, historiografi Indonesia belum menempatkan Sutanti sebagai tokoh penting seperti para tokoh laki-laki yang hadir dalam historiografi.

Selain Sutanti, banyak perempuan Indonesia yang secara tidak langsung melakukan upaya bela negara melalui bidang kebudayaan. Pada tahun 1950an, mayoritas dari mereka memang memanfaatkan diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pada 1955 misalnya, tercatat sebuah grup musik dan tari tradisional dari Bali yang tampil di Cekoslovakia. Dalam grup tersebut, tujuh diantaranya merupakan penari perempuan.<sup>20</sup> Kemudian pada

<sup>18</sup> Jennifer Lindsay, "Performing Indonesia Abroad", dalam Jennifer Lindsay, dan Maya H. T. Liem (ed.), *Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950-1965*, (Leiden: KITLV Press, 2012), hlm. 191.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>20</sup> *The Straits Times*, 1 Desember 1955, dalam [www.https://eresources.nlb.gov.sg/](https://eresources.nlb.gov.sg/), diakses pada 10 Juni 2020.

1959, terdapat sekelompok penari yang melakukan misi kebudayaan di Singapura, dimana lima belas diantaranya merupakan perempuan.<sup>21</sup> Bahkan, terdapat anak perempuan yang berusia delapan tahun, yaitu Tjin Yun, yang tergabung dalam misi kebudayaan tersebut.<sup>22</sup> Tanpa disadari, peran Sutanti dan para penggiat kebudayaan tersebut juga dapat dikategorikan dalam upaya bela negara. Apalagi, bidang kebudayaan memang menjadi salah satu sarana bagi setiap negara untuk mempertahankan dan mengenalkan identitasnya kepada dunia internasional.

Pemerintahan Soekarno juga melibatkan peran kaum perempuan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Julie Sulianti Saroso, barangkali namanya tidak lagi asing bagi masyarakat Indonesia. Nama Sulianti Saroso menjadi nama sebuah rumah sakit, yang bahkan akhir-akhir ini sering muncul di berbagai media dalam rangka pemberitaan terkait penanganan Covid-19. Akan tetapi, Sulianti Saroso lebih dari sekadar nama bagi rumah sakit besar, pun lebih dari sekadar dokter perempuan biasa. Dalam sejarah kesehatan Indonesia, Sulianti Saroso memiliki peranan yang tidak boleh dilupakan. Pasca revolusi kemerdekaan, Sulianti yang saat itu bekerja di Kementerian Kesehatan, mendapatkan beasiswa dari World Health Organization (WHO) untuk mempelajari tata kelola kesehatan ibu dan anak di

<sup>21</sup> *The Straits Times*, 15 Agustus 1959, dalam [www.https://eresources.nlb.gov.sg/](https://eresources.nlb.gov.sg/), diakses pada 6 Juni 2020.

<sup>22</sup> *Ibid.*

negara-negara Eropa.<sup>23</sup> Keberhasilan Sulianti Saroso mendapatkan beasiswa dari WHO pada saat itu, tentu menimbulkan kesan tersendiri bagi dunia Internasional. Apalagi pada saat itu, jumlah perempuan yang mendapatkan beasiswa dari lembaga internasional tentu tidak banyak jumlahnya. Dalam hal ini, Sulianti Saroso tentu telah ikut serta dalam membela eksistensi Indonesia yang pada 1950-an tengah memulihkan diri dari keterpurukan politik dan ekonomi akibat perang.

Sumbangan Sulianti Saroso tak berhenti pada pencapaiannya mendapatkan beasiswa dari WHO. Sepulang dari Eropa pada 1952, Sulianti Saroso menerapkan ilmunya dalam kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Gagasan terbesar Sulianti Saroso adalah pengendalian angka kelahiran melalui edukasi seks dan kebijakan keluarga berencana. Akan tetapi, gagasan tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Namun, gagasan Sulianti Saroso pada 1950an tersebut bagaimanapun telah menjadi akar dari program Keluarga Berencana yang diterapkan di kemudian hari. Meskipun gagasan Sulianti Saroso mengalami penolakan pada masa pemerintahan Soekarno, Sulianti Saroso telah berupaya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional hingga berupaya memperbaiki kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Upaya-upaya tersebut jika dikaji dari perspektif kekinian, tentu

<sup>23</sup> Jay Akbar, "Julie Sulianti Saroso bukan Dokter Biasa", dalam <https://historia.id/politik/articles/julie-sulianti-saroso-bukan-dokter-biasa-PdEk6>, tt., diakses pada 10 Juni 2020.

termasuk upaya bela negara.

Pada masa pemerintahan Soekarno, secara keseluruhan telah terdapat ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Dinamika yang sedikit berbeda terjadi pada masa pemerintahan selanjutnya, yaitu Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Jika pada masa pemerintahan Soekarno kaum perempuan memiliki kebebasan berkiperah dalam bidang politik, maka pemerintahan Soeharto membatasi keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Hal ini disebabkan oleh upaya pembersihan kelompok kiri seperti PKI dan Gerwani, yang dinilai terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Karenanya, berakhirnya masa pemerintahan Soekarno juga menjadi pertanda bagi berakhirnya kebebasan perempuan untuk berkiperah pada bidang politik. Bahkan, masa Orde Baru menjadi disebut-sebut menjadi masa dimana domestikasi perempuan digencarkan secara massif. Akibatnya, pada masa ini, perempuan tidak banyak terlibat dalam aktivitas politik.

Meskipun mengalami domestikasi dan peminggiran dari bidang politik, kaum perempuan pada masa Orde Baru masih mendapatkan tempat untuk melakukan bela negara melalui bidang lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Sulianti Saroso, yang masih berkiperah di bidang kesehatan sampai Orde Baru berkuasa. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, Sulianti Saroso bekerja sebagai Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan dan Pembasmian Penyakit Menular. Pada

masa Orde Baru inilah, peranan Sulianti Saroso dalam upaya bela negara berjalan dengan sangat baik. Pada 1967, ketika wabah cacar melanda banyak negara di dunia, Sulianti Saroso berhasil meyakinkan WHO bahwa Indonesia terbebas dari wabah tersebut.<sup>24</sup> Kemudian, gagasan pengendalian angka kelahiran juga berhasil diwujudkan oleh Sulianti Saroso melalui realisasi program Keluarga Berencana (KB). Atas dedikasinya pada bidang kesehatan, Sulianti Saroso bahkan kemudian mendapat kehormatan dari WHO sebagai Presiden Majelis Kesehatan Dunia pada 1973.<sup>25</sup> Sulianti Saroso bahkan menjadi satu dari dua perempuan yang pernah menduduki posisi tersebut dalam sejarah Panjang WHO. Prestasi ini tentu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa perempuan Indonesia bisa ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan di negaranya.

Mengalamipembatasanpadabidang politik membuat perempuan Indonesia mencapai prestasi dan melakukan bela negara melalui bidang kebudayaan. Apalagi, Pemerintahan Soeharto memang sejak tahun 1970an menaruh minat pada bidang kebudayaan. Seringkali, para penari dan ahli musik tradisional dikirim ke kantor-kantor kedutaan besar Indonesia di negara lain, terutama di negara-negara yang memiliki minat tinggi terhadap kebudayaan Indonesia.<sup>26</sup> Hal ini misalnya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Matthew Isaac Cohen, "Three Eras of Indonesian Arts Diplomacy", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 175, No. 2-3, 2019, hlm. 263.

dilakukan oleh para perempuan yang memiliki bakat dan minat di bidang tari tradisional. Bahkan, tidak jarang dari misi kebudayaan ini dilakukan oleh anak-anak perempuan. Misalnya pada tahun 1980, terdapat anak perempuan Indonesia yang menerima penghargaan dalam kompetisi kebudayaan di Singapura.<sup>27</sup> Anak-anak tersebut berada di bawah naungan Widyarini Group, dan berhasil menunjukkan citra baik dan ketahanan Indonesia dalam hal kebudayaan.

Sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia sampai turunya Soeharto pada 1998, menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran yang tidak sedikit dalam penegakan eksistensi Indonesia. Sayangnya, narasi tentang para perempuan itu jarang sekali dihadirkan dalam sejarah nasional Indonesia. Bahkan, dalam kurikulum sejarah yang diajarkan di bangku sekolah pun, narasi tentang perempuan jarang dihadirkan. Kalaupun dihadirkan, para perempuan yang mendapat tempat terbesar adalah mereka yang berjuang melawan kolonialisme Belanda seperti Cut Nyak Dhien, Christina Martha Tiahahu, dan tokoh-tokoh lainnya. Sementara, tokoh perempuan pasca kemerdekaan mengalami pengesklusian dalam historiografi Indonesia. Akibatnya, masyarakat umum, termasuk para generasi muda, hanya melihat upaya bela negara yang dihadirkan dalam sejarah Indonesia sebagai upaya yang wajib dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu, perempuan hanya dianggap sebagai orang

---

<sup>27</sup> *New Nation*, 4 Januari 1980, dalam [www.https://eresources.nlb.gov.sg/](https://eresources.nlb.gov.sg/), diakses pada 6 Juni 2020.

yang hanya memiliki tugas mengurus anak dan rumah tangga.

### **Mengapa Kehadiran Perempuan dalam Historiografi Pasca Kemerdekaan Menjadi Penting untuk Menumbuhkan Karakter Bela Negara?**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya bela negara sepanjang sejarah Indonesia. Akan tetapi, peran mereka menjadi kurang dikenal oleh masyarakat akibat posisinya yang mengalami pengeksklusian dalam historiografi Indonesia. Padahal, menghadirkan peran perempuan dalam historiografi Indonesia sama halnya dengan bagian dari upaya menumbuhkan karakter bela negara.

Sejauh ini, peran perempuan dalam upaya bela negara mendapatkan porsi yang cukup banyak dalam penulisan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Memang, kaum perempuan memiliki peranan yang sangat penting sepanjang periode pergerakan nasional. Akan tetapi, menghadirkan narasi tentang peran perempuan pasca kemerdekaan juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengenalkan tokoh perempuan seperti Supeni, Sutanti, Sulianti Saroso, atau para perempuan lainnya yang memiliki andil dalam menegakkan eksistensi negara pasca kemerdekaan, juga sangat berperan dalam menyegarkan ingatan masyarakat tentang bela negara. Bahkan, seharusnya, narasi tentang peran perempuan pasca kemerdekaan

dapat jauh lebih mudah digunakan untuk “mengindoktrinasi” masyarakat bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan yang berdaya dan berguna bagi nusa dan bangsanya. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara yang terbuka dalam menempatkan perempuan di ruang-ruang publik. Bahkan, Rachel Rinaldo dalam kajiannya menyebutkan bahwa Indonesia sangat terbuka mengenai sejarah aktivisme perempuan dan keterkaitannya dengan nasionalisme akibat dari feminisasi ruang publik.<sup>28</sup>

Selain itu, menghadirkan perempuan dalam narasi sejarah dan menempatkannya dalam konteks bela negara juga dapat menyeimbangkan hubungan dekat antara bela negara dan militerisme. Memang kita semua mengakui, bahwa kekuatan militer atau TNI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara. Akan tetapi, upaya secara militer tersebut tidak dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Pun upaya “pembaruan” historiografi tersebut dapat mendorong masyarakat, terutama perempuan, untuk berpikir cerdas dalam memberikan upayanya sebagai bentuk bela negara, misalnya melalui inovasi produk untuk meningkatkan ekonomi nasional dan menghindarkan Indonesia dari penjajahan ekonomi. Hal ini sangat berguna untuk menjauhkan masyarakat Indonesia dari cara berpikir *Westphalian World*, yang menganggap segala jenis masalah dan ancaman harus diselesaikan secara militer.<sup>29</sup> Seharusnya, hal ini dilihat

<sup>28</sup> Rachel Rinaldo, *op.cit.*, hlm. 1799.

<sup>29</sup> Barney Warf, “Nationalism, Cosmopolitanism,

sebagai peluang untuk mengedukasi masyarakat mengenai urgensi perempuan dalam upaya bela negara.

Menyadari urgensi mengenalkan para perempuan dan perannya pasca kemerdekaan Indonesia, maka menjadi penting bagi para akademisi untuk menulis kembali sejarah Indonesia dan menghadirkan para perempuan pasca kemerdekaan di dalamnya. Ketika kita, bangsa Indonesia, menyadari betapa pentingnya “pembaruan” historiografi Indonesia, maka yang menjadi permasalahan adalah narasi peran perempuan seperti apa yang harus dihadirkan? Karenanya, penulisan perempuan dalam historiografi pasca kemerdekaan juga perlu memiliki rambu-rambu. Tentunya, penting untuk diperhatikan bahwa narasi perempuan yang seharusnya dihadirkan adalah menempatkan perempuan sebagai orang yang memiliki peran atau sebagai partisipan, bukan sebagai representasi dari suatu kelompok. Dengan demikian, diharapkan akan timbul kesadaran bahwa perempuan juga memiliki ruang yang luas dalam sejarah perjalanan bangsa dan mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya bela negara.

Narasi perempuan yang dihadirkan dalam historiografi juga harus mencakup perempuan dari seluruh kalangan. Hal ini untuk mencegah dominasi perempuan priyayi atau kelas menengah ke atas dalam historiografi, sehingga narasi sejarah tidak melulu tentang heroisme tokoh-tokoh

---

And Geographical Imaginations”, *Geographical Review*, Vol. 102, No. 3, 2012, hlm. 275.

besar. Sebab pada kenyataannya, banyak perempuan kalangan menengah ke bawah yang terlibat dalam bela negara. Pada masa revolusi kemerdekaan misalnya, banyak perempuan di desa-desa yang memilih untuk merelakan sebagian dari makanan mereka untuk diberikan kepada para pejuang yang tengah bergerilya. Narasi-narasi tentang “perempuan biasa” seperti itu pun, harus turut dihadirkan dalam historiografi. Rambu-rambu ini perlu ditekankan agar penulisan sejarah Indonesia tidak mengulangi penulisan sejarah kolonial, dimana perempuan dianggap penting ketika mereka berasal dari kalangan bangsawan.

Dengan menghadirkan narasi tentang para perempuan pasca kemerdekaan, narasi sejarah Indonesia tentu akan menjadi lebih beragam. Dengan demikian, narasi sejarah menjadi lebih kritis dan analitis, karena menghadirkan perempuan yang sebelumnya merupakan orang-orang yang terkecuali dalam historiografi. Narasi sejarah semacam ini akan mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk memiliki kesadaran sejarah. Dengan kesadaran sejarah inilah, historiografi yang menghadirkan peran para perempuan pasca kemerdekaan dapat berguna dalam upaya menumbuhkan karakter bela negara.

Sartono Kartodirdjo dengan tegas berbicara mengenai pentingnya kesadaran sejarah. Menurutnya, bangsa yang tidak mengenal sejarahnya adalah bangsa yang kehilangan identitasnya. Karenanya, kesadaran menjadi penting

dalam pembangunan bangsa. Dengan kesadaran sejarah itulah, akan timbul tanggungjawab baik secara moral maupun sosial terhadap pembangunan bangsa.<sup>30</sup> Senada dengan Sartono Kartodirdjo, Soedjatmoko pun menegaskan bahwa kesadaran sejarah menjadi kepentingan bagi seluruh bangsa Indonesia.<sup>31</sup> Mengingat betapa pentingnya kesadaran sejarah tersebut, tentu penulisan sejarah yang memuat peran perempuan pasca kemerdekaan menjadi sangat penting.

Menghadirkan perempuan ke dalam historiografi pasca kemerdekaan memang tidak akan mengubah apapun yang telah terjadi, kecuali perubahan penulisan sejarah yang *andocentric* menuju penulisan sejarah *androgynous*.<sup>32</sup> Bahkan, dapat dikatakan bahwa “pembaruan” historiografi tersebut juga tidak memberikan apa-apa bagi pemerintah Indonesia. Akan tetapi, narasi tentang perempuan akan membantu menanamkan karakter bela negara pada generasi muda, terutama pada kaum perempuan yang selama ini masih tersingkirkan dalam upaya bela negara. Dengan mengenal tokoh-tokoh perempuan seperti Supeni Pudjobuntoro,

<sup>30</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 296-297.

<sup>31</sup> Soedjatmoko, “Kesadaran Sejarah dan Pembangunan”, *Prisma*, Vol. V, No. 7, 1976, hlm. 12-14.

<sup>32</sup> Penulisan sejarah *andocentric* merupakan penulisan narasi sejarah yang mengutamakan peran laki-laki. Sementara itu, penulisan sejarah *androgynous* menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam historiografi. Lebih lanjut lihat, Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob, *Perempuan Dalam Historiografi Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hlm. 8.

Sutanti, atau tokoh perempuan lainnya, maka perempuan Indonesia menjadi memiliki *role model* dalam upaya bela negara. Secara tidak langsung, upaya ini tentu mendorong generasi muda untuk memiliki patriotisme, nasionalisme, dan keyakinan bahwa kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam upaya bela negara. Bahkan, menghadirkan narasi tentang perempuan juga akan mendorong generasi muda untuk percaya pada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka memahami dan “menenal” Supeni dengan perjuangan diplomasinya yang tidak mudah, tetapi berhasil meyakinkan negara-negara Asia dan Afrika untuk mendukung pembebasan Irian Barat, atau narasi tentang tokoh perempuan lainnya. Dengan kata lain, pembangunan narasi mengenai peran para perempuan pasca 1945 akan menginspirasi generasi muda untuk memiliki karakter bela negara.

Adapun indoktrinasi agar narasi peran perempuan dalam bela negara dapat sampai kepada generasi muda dan mendorong mereka memiliki kesadaran sejarah atas hal tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah sejauh ini masih menjadi salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran sejarah sejak usia dini. Pendidikan sejarah ini dapat dilakukan dengan banyak cara. Cara yang paling formal tentu melalui pengajaran sejarah di bangku sekolah. Untuk mengenalkan perempuan yang terlibat dalam bela negara pasca kemerdekaan, tentu dibutuhkan kerja sama banyak pihak,

mulai dari sejarawan, ahli pendidikan, serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Cara lainnya, dapat melalui cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa cerita disini bukan sekadar dongeng yang diperdengarkan pada anak-anak saja. Nilai-nilai yang dihadirkan dari setiap perempuan yang diceritakan, tentu harus ditanamkan pula pada anak-anak. Dengan langkah-langkah sederhana itu, sebenarnya karakter bela negara pada generasi muda dapat terus ditumbuhkan. Kaum perempuan yang selama ini tereksklusi dalam kegiatan bela negara, juga akan terdorong untuk menyadari bahwa perempuan juga memiliki peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi, semakin menuju zaman yang modern, bentuk ancaman terhadap negara tidak hanya terbatas pada militer. Perang pada zaman modern dapat berupa perang ekonomi, budaya, ideologi, dan dalam bentuk lainnya.<sup>33</sup> Karenanya, peran perempuan dalam bela negara melalui berbagai bidang harus ditingkatkan.

## Kesimpulan

Rendahnya kesadaran akan pentingnya karakter bela negara, sebenarnya merupakan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka penggunaan perspektif sejarah menjadi sangat

penting. Bagaimanapun, harus diakui bahwa sejarah merupakan alat pendidikan yang cukup efektif untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat, terutama pada generasi muda. Karenanya, perlu dihadirkan historiografi yang memuat peran para perempuan dalam upaya menjaga eksistensi Indonesia pasca kemerdekaan dalam berbagai bidang. Pun pada kenyataannya, memang terdapat banyak perempuan yang memberikan sumbangannya bagi Indonesia, seperti Supeni, Sutanti, dan tokoh-tokoh lainnya.

Nantinya, tulisan sejarah yang memuat peranan para perempuan dalam menegakkan eksistensi Indonesia, yang secara tidak langsung juga termasuk upaya bela negara, dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini sebenarnya memiliki dampak positif dalam pembelajaran sejarah di bangku sekolah, karena narasi yang dihadirkan tidak lagi monoton, dan generasi muda juga memiliki kesadaran kesetaraan gender melalui pendidikan sejarah.

Demikian pentingnya tugas kita, bangsa Indonesia, terutama para akademisi, untuk menghadirkan narasi tentang peran para perempuan pasca kemerdekaan dalam sejarah Indonesia. Narasi ini, secara tidak langsung akan mendorong generasi muda memiliki kesadaran sejarah, dan dapat menjadikan tokoh-tokoh perempuan yang dihadirkan sebagai inspirasi dalam kegiatan bela negara. Akan tetapi, upaya ini tentu bukan hanya menjadi tugas berat sejarawan.

---

<sup>33</sup> Sri Indrayani Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara", *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 175.

Unsur lain seperti pendidik, pemerintah, dan pegiat sejarah di komunitas-komunitas juga harus andil sesuai kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, narasi sejarah akan mencapai posisinya dalam upaya menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga sejarah juga dapat menjadi acuan bagi bangsa untuk bergerak membela dan mempertahankan Indonesia dari segala jenis ancaman.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 2017. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Lindsay, Jennifer. 2012. "Performing Indonesia Abroad". Dalam Jennifer Lindsay, dan Maya H. T. Liem (ed.). *Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950-1965*. Leiden: KITLV Press.
- Martyn, Elizabeth. 2005. *The Women's Movement in Postcolonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. London: RoutledgeCurzon.
- Nuryanti, Reni dan Bachtiar Akob. 2019. *Perempuan Dalam Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasia Republik Indonesia. 1996. *Sejarah Diplomasia Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa*. 4 jilid. Jakarta: Deplu RI.
- Rasid, Gadis. 1982. *Maria Ulfah Subadio: Pembela Kaumnya*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Reid, Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Penerbit Serambi.

Suryokusuma, Suryanto, ed. 2016. *Bunga Rampai Konsep Sistem Pertahanan Non Militer: Suatu Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Vreede-de Stuers, Cora. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.

### Jurnal

- Cohen, Matthew Isaac. 2019. "Three Eras of Indonesian Arts Diplomacy". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Vol. 175. No. 2-3.
- Darwin, Muhadjir. 2004. "Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 7. No. 3.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2014. "Historisitas Politik Perempuan Indonesia". *Paramita*. Vol. 24. No. 2.
- Kramer, Llyod. 1997. "Historical Narratives and the Meaning of Nationalism". *Journal of the History of Ideas*. Vol. 58. No. 3.
- Lucas, Anton. 1996. "Pengalaman Wanita Selama Zaman Pendudukan dan revolusi, 1942-1950". *Prisma*. Vol. XXV. No.5.
- Minarova-Banjac, Cindy. 2018. "Gender Culture in Diplomacy: A Feminist Perspective". *Culture Mandala*. Vol. 13. No. 1.
- Murphy, Ann. 1999. "Indonesia and Globalization". *Asian Perspective*. Vol. 23. No.4.
- Panikkar, K.N. 2016. "Nationalism and Its Detractors". *Social Scientists*. Vol. 44. No. 9.
- Pohlman, Annie. 2011. "Women and Nationalism in Indonesia". *Historia*. Vol. 12. No. 1.



- Rinaldo, Rachel. 2008. "Envisioning the Nation: Women Activists Religion and the Public Sphere in Indonesia". *Social Forces*. Vol. 86. No. 4.
- Soedjatmoko. 1976. "Kesadaran Sejarah dan Pembangunan". *Prisma*. Vol. V. No. 7.
- Suriata, I Nengah. 2019. "Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional". *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4. No. 1.
- Umra, Sri Indrayani. 2019. "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara". *Lex Renaissance*. Vol. 4. No. 1.
- Warf, Barney. 2012. "Nationalism, Cosmopolitanism, And Geographical Imaginations". *Geographical Review*. Vol. 102. No. 3.
- Zuhdi, Susanto. "Bela Negara Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia". *Wira*. Edisi Khusus 2017. Hlm. 15-20.
- New Nation, 4 Januari 1980, dalam <https://eresources.nlb.gov.sg/>, diakses pada 6 Juni 2020.
- Sianturi, Kristomei, "Bersatu, Bela Negara Lawan Covid-19", dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/305145-bersatu-bela-negara-lawan-covid-19>, 18 April 2020, diakses pada 6 Juni 2020.
- The Strait Times, 1 Desember 1955, dalam [www.https://eresources.nlb.gov.sg/](http://www.eresources.nlb.gov.sg/), diakses pada 6 Juni 2020.
- The Straits Times, 15 Agustus 1959, dalam [www.https://eresources.nlb.gov.sg/](http://www.eresources.nlb.gov.sg/), diakses pada 6 Juni 2020.

## Skripsi

- Ndoi, Yunita Maria. 2018. "Pemberitaan Perempuan Dalam Koran Kedaulatan Rakyat Tahun 1945-1950". *Skripsi*. Jurusan Sejarah. Fakultas Sastra. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Wahyu, Itama Citra Dewi Kurnia. 2014. "Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Tahun 1935-1988". *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Sejarah. Universitas Negeri Yogyakarta.

## Website

- Akbar, Jay, "Julie Sulianti Saroso bukan Dokter Biasa", dalam <https://historia.id/politik/articles/julie-sulianti-saroso-bukan-dokter-biasa-PdEk6>, tt., diakses pada 10 Juni 2020.
- Ardanawati, Indira, "Supeni: "Irian Lady" di Balik Operasi Pengambilalihan Papua", dalam <https://tirto.id/supeni-irian-lady-di-balik-operasi-pengambilalihan-papua-ehsC>, 4 September 2019, diakses pada 8 Juni 2020.

